



2023



PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KINERJA

**Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian & Perdagangan**

TRIWULAN I

- PENDAHULUAN
- PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KINERJA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu bulan dan menjabarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.

Lumajang, Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS

KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN



MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.

NIP. 19731118 199303 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. GAMBARAN UMUM.....	3
D. DASAR HUKUM.....	6
E. SISTEMATIKA.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	17
B. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV P E N U T U P.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berfungsi untuk mengetahui



kemampuannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan pembangunan Perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2023 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a) Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Menjadikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai Instansi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis;
- c) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan



beserta jaringannya guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;

- d) Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
- e) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif – efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

C. GAMBARAN UMUM

a. Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang No. 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

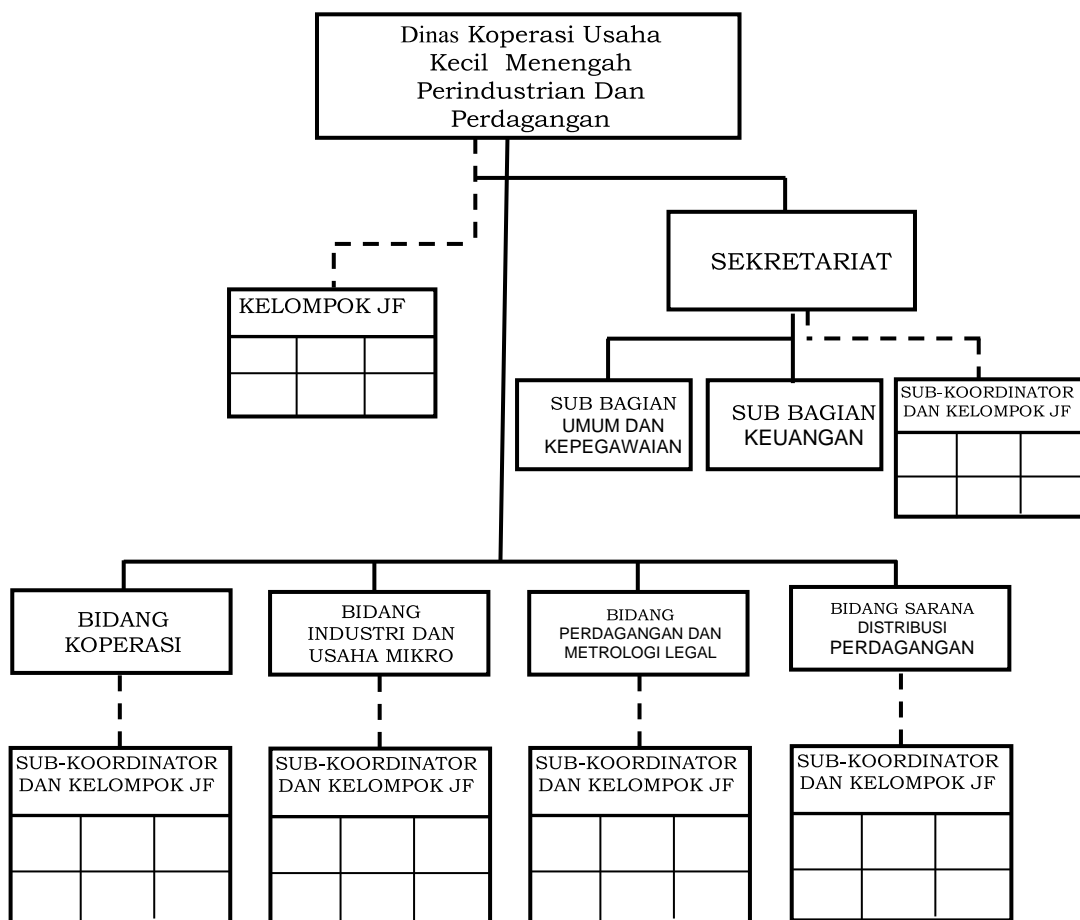
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Di samping itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
- b) pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta

- sarana distribusi perdagangan;
- d) pelaksanaan administrasi bidang koperasi, usaha mikro dan industri, perdagangan dan metrologi legal, serta sarana distribusi perdagangan;
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 11 Tahun 2022 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

b. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 259 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 78 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 176 orang, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 3 orang, dan Petugas Pendamping Koperasi sebanyak 2 orang



Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TKK Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Maret 2023

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah	%
		PNS	TKK	PPKL	Pendamping		
1.	SD	4	8			12	5
2.	SMP	13	17			30	12
3.	SMA/SMK	37	108			145	56
4.	D1	-	-			-	0
5.	D2	-	3			3	1
6.	D3	2	1			3	1
7.	D4/S1	17	38	3	2	60	23
8.	S2	5	1			6	2
J U M L A H		78	176	3	2	259	100

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang proporsi paling banyak adalah lulusan SMA/SMK sebanyak (56%) diikuti D4/S1 (23%), SMP (12%), SD (5%), S2 (2 %), D3 (1%), D2 (1%) dan yang paling kecil D1 (0%).

Jumlah pegawai per unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang per Maret 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Per Maret 2023

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretariat	32	
2	Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal	22	
3	bidang Usaha Mikro dan Industri	15	
4	Bidang Koperasi	14	
5	Bidang Sarpras	176	
	JUMLAH	259	



Dilihat dari Pegawai Per Unit Kerja dapat dijelaskan bahwa Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tidak hanya ada di tingkat II (dua) saja akan tetapi juga menyebar di 15 kecamatan yang terdiri 29 pasar.

c. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi



- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 21. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
 22. Peraturan Bupati Lumajang No. 11 Tahun 2022 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

d. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Adapun Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

- A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan ;
 2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;



3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
 4. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.;
- B. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Perubahan Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2018 – 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Rp	189.035.108.703
2. Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp	10.489.913.260.792
3. Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp	4.934.785.719.830
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp	3.454.887.194.442
5. Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Rp	22.279.999

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2018-2023

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah,



sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Revisi perjanjian kinerja dimungkinkan terjadi, dimana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- a. Adanya revisi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023, sehingga adanya Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) pada pertengahan tahun melalui Perubahan APBD

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Rp	189.035.108.703
2. Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp	10.489.913.260.792
3. Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp	4.934.785.719.830
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp	3.454.887.194.442
5. Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Rp	22.279.999

Adapun Program, kegiatan dan Sub kegiatan serta anggaran tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan tanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI	23.248.661.133
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.627.951.153
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.167.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.567.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.673.684.579
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.617.940.579
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.744.000
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7.000.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000
1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	5.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.165.466
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.988.004
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.820.375
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.911.087
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	1.485.000
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.961.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.030.738
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.030.738
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.381.117.200
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.125.200
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.003.992.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.786.170
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.486.250
1.8.2	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	50.300.000
1.8.3	Pemeliharaan Aset tak berwujud	5.000.000
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.999.920
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	3.000.000
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000
III	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	28.400.000
3.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	28.400.000
3.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23.400.000
3.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000
IV	Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi	37.560.000
4.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.560.000
4.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000
4.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.560.000
V	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	311.360.000
5.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	311.360.000
5.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	311.360.000
VI	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	981.330.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	981.330.000
6.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	981.330.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG USAHA MIKRO	12.368.300.000
VII	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	12.096.650.000
7.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	12.096.650.000
7.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	197.400.000
7.1.2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	11.899.250.000
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	162.409.980
8.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	162.409.980
81.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	162.409.980
IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.602.639.380
9.1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1.450.000
9.1.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahayadan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan PelabelanBahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.450.000
9.1.2	Pengawasan Distribusi,Pengemasan danPelabelan BahanBerbahaya TerhadapPegguna Akhir BahanBerbahaya (PA-B2)maupun Produsen B2 (P-B2)	1.450.000
X	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.117.800.000
10.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.272.800.000
10.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	687.400.000
10.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.585.400.000
10.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	845.000.000
10.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	845.000.000
XI	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	39.800.000
11.1	Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/ Kota	9.800.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
11.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5.000.000
11.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.800.000
11.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsididi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
11.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000
XII	Program Pengembangan Ekspor	173.000.000
12.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	173.000.000
12.1.1	Pameran Dagang Nasional	100.000.000
12.1.2	Pameran Dagang Lokal	60.000.000
12.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	13.000.000
XIII	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	200.589.380
13.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	200.589.380
13.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	175.389.380
13.1.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	25.200.000
XIV	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	70.000.000
14.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	70.000.000
14.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	70.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.833.869.313
XV	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4.833.869.313
15.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.826.169.313
15.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000
15.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.726.169.313
XVI	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	2.000.000
16.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
16.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000
XVII	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5.700.000
17.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	5.700.000
17.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5.700.000
JUMLAH		31.685.169.826



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua melaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

a. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan

Capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan



tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

- 85 ke atas : Sangat Baik
- 70 ≤ x < 85 : Baik
- 55 ≤ x < 70 : Cukup Baik
- x < 55 : Kurang Baik

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feedback* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian



tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2023. Capaian indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	189.035.108.703	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
2.	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	10.489.913.260.792	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	4.934.785.719.830	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.454.887.194.442	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur
5.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	22.279.999	Belum dapat diukur (data dari BPS)	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2023 (Data diolah)

Adapun Program / Kegiatan / Sub Kegiatan penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 22%

Pada program ini melaksanakan program rutin sekretariat yang merupakan pendukung bagi kegiatan teknis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Capaian pada Triwulan I sebesar 22%.

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%



Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 25%

Pada kegiatan ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, baik itu triwulan maupun semester, sehingga pada tiap – tiap triwulan melaksanakan penyusunan dokumen yang sama dengan periode yang berbeda. Adapun pada triwulan ini menghasilkan 2 dokumen antara lain penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023.

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 1 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Triwulan III.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Target Kinerja Tahun 2023 : 5 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : 8 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 1 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja yaitu Evaluasi kinerja triwulan yang tertuang dalam form E - 81.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 25%

Kegiatan ini melaksanakan penyusunan seluruh dokumen keuangan yang terdiri dari laporan harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Dan juga dokumen yang berupa pengajuan SPJ kegiatan rutin dengan perinciannya hingga menjadi SP2D.

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Target Kinerja Tahun 2023 : 88 orang / 12 bulan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 78 orang

Sub kegiatan ini melaksanakan penyerapan anggaran gaji untuk seluruh ASN yang terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan termasuk tunjangan tambahan penghasilan pegawai dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.



1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target Kinerja Tahun 2023 : 12 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3 dokumen

Sub kegiatan ini melaksanakan belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen dan pengelola keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Target Kinerja Tahun 2023 : 12 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3 dokumen

Sub kegiatan ini melaksanakan penatausahaan rutin sub bagian keuangan yaitu proses verifikasi pada dokumen pengajuan SPJ.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 14%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah yang dilakukan secara berkala, baik triwulan maupun semester.

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan fasilitasi pengamanan Barang Milik Daerah, berupa proses penyertifikatan tanah



milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan serta pengamanan aset yang sedang dalam sengketa.

1.3.2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Target Kinerja Tahun 2023 : 4 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 1 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi BMD yang berada di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Kantor Bidang Metrologi Legal serta 29 pasar yang dilaksanakan secara berkala / triwulan.

1.3.3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang berada di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Kantor Bidang Metrologi Legal serta 29 pasar yang dilaksanakan secara berkala / triwulan.

1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 25%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,



Perindustrian, dan Perdagangan yaitu dari jasa pelayanan pasar dan jasa pelayanan tera – tera ulang yang dilaksanakan secara berkala, baik bulanan, triwulan dan semester.

1.4.1 Penetapan Wajib Retribusi Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 dokumen

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penerbitan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) sesuai dengan ijin yang sudah disetujui dan STS Perijinan.

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 20%

Pada kegiatan ini melaksanakan fasilitasi administrasi umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan/material, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 paket

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan komponen – komponen instalasi listrik yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar.

1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 paket



Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan belanja alat – alat kebersihan, bahan pembersih dan ATK yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.

1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 paket

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen yang dibutuhkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.

1.5.4 Penyediaan Bahan/Material

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 paket

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 paket

Pada sub kegiatan ini melaksanakan penyediaan bahan / material khususnya pada pengisian APAR yang akan ditempatkan di kantor maupun di pasar – pasar daerah.

1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target Kinerja Tahun 2023 : 90 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 17 laporan

Pada sub kegiatan ini melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa fasilitasi makan dan minum rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi pengadaan BMD

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah kegiatan pengadaan barang penunjang operasional kantor.

1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit

Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan alat Pendingin/AC.

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 25%

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang menunjang urusan penyediaan jasa operasional kantor.

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Target Kinerja Tahun 2023 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3 laporan

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan kegiatan belanja rutin untuk pembayaran tagihan rekening listrik, rekening air, rekening telepon, rekening internet untuk kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, kantor bidang metrologi legal dan pasar – pasar daerah.

1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan



Target Kinerja Tahun 2023 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3 laporan

Pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum ini melaksanakan pembelanjaan untuk gaji tenaga kontak bulanan, pembayaran BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan kematian.

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD

Target Kinerja Tahun 2023 : 100%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 27%

Pada Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Target Kinerja Tahun 2023 : 73 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 16 unit

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan.

1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Target Kinerja Tahun 2023 : 66 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 40 unit

Pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini merupakan pemeliharaan ac, server, computer, printer,



dan laptop.

1.8.3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Indikator Kinerja : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit

Pada sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ini berupa pemeliharaan aplikasi SI DILAN.

1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhap

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit

Pada sub kegiatan berupa pemeliharaan gedung kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.

Pada Program / kegiatan penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan ini merupakan program dan kegiatan yang melekat pada sekretariat dan tidak mencapai capaian kinerja 100%, dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya dan penundaan kegiatan dikarenakan penggabungan OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dengan Dinas Koperasi UM digabung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Indikator Kinerja : Nilai Omset Koperasi Simpan Pinjam

Target Kinerja Tahun 2023 : Rp 10.000.000.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 106.220.907.960

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam adalah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Tahun 2023 ini menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan motivasi kepada pengurus dan pengawas koperasi agar lebih memperhatikan legalitas perizinan usahanya dan dapat mengelola koperasinya secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memiliki pengaruh atau dampak yang positif dalam upaya peningkatan kenaikan nilai omset koperasi simpan pinjam. Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih Rp 106.220.907.960 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

2.1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Persentase izin usaha simpan pinjam Koperasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 80%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0

Dalam rangka pembinaan terhadap Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Lumajang, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang melalui bidang perkoperasian melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Tahun 2023. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 0% dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

2.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Usaha SimpanPinjam dan PembukaanKantor Cabang, CabangPembantu dan Kantor KasKoperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi denganWilayah



Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2023 : 5 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit usaha

Adanya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari pihak koperasi dalam memenuhi legalitas operasionalnya, sehingga bisa meminimalisir koperasi yang tidak resmi/ rentenir berkedok koperasi di masyarakat. Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 0 artinya belum terlaksana pada triwulan I karena Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menerbitkan surat edaran (SE) tentang kebijakan moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam yang berlaku mulai Februari sampai dengan April 2023.

III. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 82%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 45,11%

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Koperasi untuk mengawasi dan memeriksa Koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Indikator program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 82%. Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebesar 45,11%.

3.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 40 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 240 koperasi

Dilaksanakannya Pengawasan/Pemeriksaan Koperasi, diharapkan pengelolaan Koperasi di Kabupaten Lumajang bisa lebih baik, yang memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan seluruh anggota dan masyarakat pada umumnya. Realisasi kinerja



Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 240 koperasi. Realisasi melebihi target tahun 2023 dengan harapan agar koperasi dapat tepat waktu melaksanakan RAT sehingga sesuai aturan yang ada.

3.1.1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2023 : 40 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 koperasi

Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta meneliti catatan dan pembukuan yang ada koperasi. Realisasi Kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2023 adalah 2 koperasi yang diawasi Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas.

3.1.2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kinerja

Target Kinerja Tahun 2023 : 40 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 238 koperasi

Pemeriksaan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan Koperasi adalah untuk memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik Pengelolaan Usaha Koperasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasai tindak



lanjut terkait pembinaan dan/atau penerapan sanksi. Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sudah melebihi target kinerja tahun 2023 dikarenakan koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejumlah 238 koperasi, dimana RAT merupakan bentuk kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang – undangan.

IV. Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat

Target Kinerja Tahun 2023 : 82%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0,8%

Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Adapun kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Indikator Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi adalah Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat sebesar 82%. Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 0,8% dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebar di triwulan berikutnya.

4.1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat

Target Kinerja Tahun 2023 : 100 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 1 koperasi

Dilaksanakannya penilaian kesehatan yang dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bahan evaluasi agar koperasi mampu meningkatkan performa dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, serta penerapan prinsip syariah bagi KSPPS/USPPS. Selain itu, Penilaian Kesehatan Koperasi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri koperasi. Realisasi kinerja triwulan I Tahun 2023



koperasi simpan pinjam yang sehat sebanyak 1 unit usaha dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

4.1.1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

Target Kinerja Tahun 2023 : 100 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 unit usaha

Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, ataupun koperasi lain, wajib mengelola usahanya secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga koperasi senantiasa dalam keadaan “sehat” sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberi manfaat kepada anggota dan masyarakat. Realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 2 unit usaha dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

4.1.2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan

Target Kinerja Tahun 2023 : 4 koperasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 koperasi

Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota diberikan ke unit usaha koperasi yang telah dinilai kesehatannya. Hal ini sebagai apresiasi koperasi yang menjalankan prinsip-koperasi dengan benar dan memiliki pertumbuhan yang aman dan kontiniu sekaligus menjadi parameter baru bagi koperasi. Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 0% dikarenakan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

V. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Indikator Kinerja : Persentase Pendidikan Koperasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 86%



Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 21 %

Pendidikan dan latihan perkoperasian adalah salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota tentang besarnya manfaat yang diberikan oleh koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Melalui pendidikan, anggota juga dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai, prinsip-prinsip dan praktik-praktik koperasi. Indikator Program ini adalah Persentase Pendidikan Koperasi sebesar 86%. Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 21% dikarenakan jadwal pelaksanaan ada di beberapa triwulan.

5.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian

Target Kinerja Tahun 2023 : 250 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 60 orang

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota, pengurus, pengawas, atau karyawan dalam bidang pengetahuan perkoperasian, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan dan usaha. Realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 60 orang dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

5.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

Target Kinerja Tahun 2023 : 250 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 60 orang

Pelatihan koperasi berorientasi pada kinerja, dengan maksud untuk memperbaiki keahlian pekerja sehingga dapat lebih mampu dalam menjalankan tupoksi pekerjaannya sehingga SDM pengelola koperasi memiliki kualitas yang baik, memiliki kemampuan manajemen yang baik serta berwawasan/pegetahuan luas. Realisasi kinerja Triwulan I



Tahun 2023 masih 60 orang dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

VI. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Indikator Kinerja : Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 81 %

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0,6 %

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan unit usaha lainnya. Indikator Program ini adalah Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar 81%. Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 0,6% dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

6.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 250 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 orang

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan fasilitasi untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi. Realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 hanya 2 orang dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

6.1.1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,



Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang
Memahami Pengetahuan
UKM dan Kewirausahaan

Target Kinerja Tahun 2023 : 250 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 orang

Bentuk kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah pembinaan dan sosialisasi ke Koperasi Unit Desa (KUD), dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang UKM dan kewirausahaan bagi SDM yang mengelola Koperasi Unit Desa (KUD). Realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 0% dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator Kinerja : Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro

Target Kinerja Tahun 2023 : 76%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%

UMKM merupakan salah satu barometer perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Indikator Program ini adalah Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro sebesar 76%. Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 0% dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

7.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja : Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan
Usaha Mikro

Target Kinerja Tahun 2023 : 220 usaha mikro

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan



Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan merupakan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro yang targetnya sebanyak 220 usaha mikro. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

7.1.1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Stabilitas dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kabupaten

Target Kinerja Tahun 2023 : 220 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit usaha

Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro bertujuan memberikan gambaran potensi dan permasalahan usaha mikro yang nantinya dapat direncanakan lebih lanjut untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lumajang. Tidak hanya itu, dengan adanya informasi yang lengkap dapat mempromosikan potensi usaha mikro di Kabupaten Lumajang sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada berbagai UMKM yang terdapat di Kabupaten Lumajang.

7.1.2 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha

Target Kinerja Tahun 2023 : 194 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit usaha



Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro adalah belanja dana hibah penguatan modal. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 0% dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

VIII. Program Pengembangan UMKM

Indikator Kinerja : Persentase Perkembangan Usaha Mikro
Target Kinerja Tahun 2023 : 74%
Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM. Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 masih 0% dikarenakan akan pelaporan dilaksanakan pada Triwulan II berikutnya.

8.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Indikator Kinerja : Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 220 usaha mikro

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 150 usaha mikro

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan merupakan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro yang targetnya sebanyak 220 usaha mikro. Realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 150 usaha mikro.

8.1.1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Indikator Kinerja : Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasilitasi dalam



Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Target Kinerja Tahun 2023 : 220 unit usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 150 unit usaha

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro agar menjadi pelaku usaha mikro yang mandiri dan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha pelaku usaha mikro, khususnya pada aspek produksi. Realisasi kinerja triwulan 1 sebanyak 150 unit usaha.

IX. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator Kinerja : Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha

Target Kinerja Tahun 2023 : 90%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai indikator Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha sebesar 90%. Realisasi kinerja Triwulan I adalah 0%, dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

9.1. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang diawasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 3 unit

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 unit

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko akibat Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya. Realisaasi kinerja



triwulan I masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

9.1.1. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 laporan

Bentuk kegiatan yang dilakukan pada sub kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) yaitu Pelaksanaan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya dengan target kinerja sebanyak 1 laporan, realisasi kinerja triwulan I masih 0 laporan karena akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

X. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Nilai retribusi pelayanan pasar

Target Kinerja Tahun 2023 : Rp 8.000.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 2.232.753.081

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai indikator kinerja nilai retribusi pelayanan pasar dimana setoran retribusi ini merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang dari pemungutan retribusi pelayanan pasar. Adapun target nilai retribusi pelayanan pasar tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 8.000.000.000 sehingga capaian Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp 2.232.753.081.

10.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



Indikator Kinerja : prosentase sarana yang dibangun/
direhab

Target Kinerja Tahun 2023 : 16,67%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 %

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai indikator kinerja yaitu prosentase sarana yang dibangun/ direhab, belum ada pasar yang direhab/dipelihara karena masih dalam proses perencanaan sehingga capaian terhadap target Triwulan I tahun 2023 adalah 0%.

10.1.1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Sarana Distribusi
Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2023 : 30 pasar

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 29 pasar

Salah satu pendukung meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan adalah Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Adapun jumlah sarana distribusi perdagangan semula sebanyak 30 pasar menjadi 29 pasar dikarenakan peralihan Pasar Artagama menjadi Ruang Terbuka Hijau terhitung mulai tanggal 1 November 2022.

10.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan
Sarana Distribusi
Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2023 : 30 pasar

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 29 pasar

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pasar mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dimana capaian pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 29 pasar.

10.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

Indikator Kinerja : Jumlah pengelola pasar yang dibina

Target Kinerja Tahun 2023 : 64 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 64 orang

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya mempunyai



indikator kinerja jumlah pengelola yang dibina yang lebih difokuskan ke petugas retribusi pasar dengan tujuan meningkatkan ketelitian dalam perhitungan kembali retribusi yang telah diterima sangat dibutuhkan. Karena seringkali terdapat uang yang sudah tidak layak beredar dalam penarikan retribusi, sehingga menimbulkan kerugian. Selain itu untuk menghindari pemungutan-pemungutan liar yang sering terjadi. Adapun pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 100% .

10.2.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2023 : 12 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3 dokumen

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan merupakan kegiatan monitoring benda berharga di pasar rakyat. Target kinerja pada 2023 yaitu 12 dokumen sedangkan capaian kinerja pada Triwulan I yaitu 3 dokumen sehingga prosentase capaian 2023 sebesar 25%.

XI. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Indikator Kinerja : Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil

Target Kinerja Tahun 2023 : 84%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 92%

Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan kegiatan monitoring barang kebutuhan pokok yang harganya stabil yang dihitung berdasarkan koefisien harga antar waktu yaitu 13 komoditi antara lain :

- 1) Beras = 0,82%
- 2) Jagung = 0,00%
- 3) Bawang Merah = 3,90%



- 4) Bawang Putih = 8,49%
- 5) Cabe Merah = 6,50%
- 6) Cabe Rawit = 12,76%
- 7) Daging Sapi = 0,00%
- 8) Daging Ayam Ras= 1,46%
- 9) Telur Ayam Ras= 0,67%
- 10) Gula Pasir= 0,00%
- 11) Minyak Goreng Kemasan= 2,06%
- 12) Kedelai = 5,86%
- 13) Tepung Terigu = 0,00%

Berdasarkan perhitungan tersebut yang koefisien harga antar waktu dibawah 10% sejumlah 12 bahan pokok sehingga dapat dikatakan stabil, realisasi kinerja triwulan I 2023 sebesar 92% sehingga capaian kinerja pada Triwulan I terhadap target 110%.

11.1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja : Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan

Target Kinerja Tahun 2023 : 13 barang

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 13 barang

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota merupakan kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil secara pemantauan langsung maupun yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan. Komoditi yang dipantau sejumlah 13 komoditi antara lain beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng kemasan, kedelai, dan tepung terigu.

11.1.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha



Distribusi Barang dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2023 : 12 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3 laporan

Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota merupakan kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil dan tersedianya data panel/informasi harga dan pasokan pangan di tingkat produsen (penggilingan), pedagang grosir dan pedagang eceran secara berkala, data tersebut bisa digunakan sebagai indikator pengambilan kebijakan jika sewaktu-waktu ada ketidakstabilan harga dan pasokan pangan di pasar. Adapun capaian kinerja pada triwulan ini yaitu 3 laporan atau sebesar 25%.

11.1.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2023 : 4 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 2 laporan

Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Sebab, seringkali ada kenaikan harga pada saat terutama pada saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan menjelang pergantian tahun. Sub kegiatan ini dilaksanakan dikarenakan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya berupa minyak goreng dan beras mengalami kenaikan harga. Menjelang puasa 2023, harga kebutuhan pokok mulai berangsur naik. Namun, harga minyak goreng saat ini dapat dikatakan masih stabil atau



belum mengalami perubahan drastis dari sebelumnya. Sedangkan komoditi beras pada Februari 2023 rata-rata harga beras kualitas premium di enam pasar (Pasar Baru Lumajang, Pasar Pasirian, Pasar Pronojiwo, Pasar MKS, Pasar Senduro, dan Pasar Kunir) mencapai Rp12.500,00 per kilogram (kg). Harga tersebut naik 8,75% dibanding Februari 2022 (year-on-year/yoy). Penyebab kenaikan harga beras adalah curah hujan tinggi di bulan Februari maka gabah yang dipanen kualitasnya tidak baik sehingga pihak penggilingan harus mengeluarkan ongkos produksi yang lebih tinggi, untuk mengeringkan gabah kualitas gabah pada umumnya. Capaian kinerja Triwulan I 2023 sebesar 50%.

11.2 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi

Target Kinerja Tahun 2023 : 84 kios

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 kios

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan apakah yang tercantum sesuai dengan yang telah didaftarkan di Kementerian Pertanian. Jumlah kios sebagai objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi pada Triwulan I adalah 0 kios. Sehingga capaian kinerjanya masih 0%.

11.2.1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 laporan

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 laporan

Pupuk selalu menjadi masalah krusial dalam usaha tani. Seringkali masalah kelangkaan menjadi momok



menakutkan petani menjelang musim tanam. Karenanya, pengawasan harus terus diintensifkan agar pupuk subsidi tepat sasaran dan tepat waktu. Kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi belum dilaksanakan Triwulan I sehingga capaiannya masih 0%.

XII. Program Pengembangan Ekspor

Indikator Kinerja	:	- Nilai Ekspor
		- Nilai Perdagangan Antar Daerah
Target Kinerja Tahun 2023	:	- Rp 1.000.000.000.000
		- Rp 4.161.600.000.000
Realisasi Kinerja Tw I 2023	:	- Rp 210.387.629.455
		- Rp 4.636.552.419

Ekspor dan impor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah negara. Dari kegiatan ekspor dan impor sebuah negara akan memperoleh pendapatan. Ekspor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah negara. Dari kegiatan ekspor sebuah negara akan memperoleh pendapatan. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan. Adapun rekapitulasi nilai ekspor dan nilai perdagangan antar daerah ini dapat terlihat sampai dengan triwulan I tahun 2023 masing-masing sebesar Rp 210.387.629.455 dan Rp 4.636.552.419.

12.1 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor

Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : nilai omset promosi dagang

Target Kinerja Tahun 2023 : Rp 250.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 0

Salah satu pendukung pertumbuhan nilai perdagangan daerah adalah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dimana indikator kinerja kegiatan ini nilai omset promosi dagang. Realisasi kinerja pada Triwulan I yaitu 0 karena promosi dilaksanakan pada Triwulan III sedangkan misi dagang dilaksanakan setelah ada undangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

12.1.1 Pameran Dagang Nasional



Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang

Target Kinerja Tahun 2023 : 15 pelaku usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 pelaku usaha

Pameran Dagang Nasional berupa pameran produk lokal yang diselenggarakan di tingkat nasional yaitu pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2023. Sehingga realisasi kinerja terhadap target 2023 masih 0.

12.1.2 Pameran Dagang Lokal

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal

Target Kinerja Tahun 2023 : 15 pelaku usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 pelaku usaha

Pameran Dagang Lokal berupa pameran produk lokal yang diselenggarakan di tingkat provinsi Jawa Timur antara lain pameran Jatim Fair 2023. kegiatan ini diselenggarakan di Grand City Mall & Convex Surabaya pada bulan Oktober 2023. Ajang Jatim Fair merupakan sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan kepada masyarakat. Selain itu juga untuk memotivasi promosi dan meningkatkan transaksi dagang selama dan sesudah pameran sebagai sarana tolak ukur daya saing produk. Sehingga realisasi kinerja pada Triwulan I masih 0.

12.1.3 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 pelaku usaha

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 pelaku usaha

Misi dagang adalah kegiatan untuk memperluas pangsa pasar dalam negeri dengan cara mempertemukan antara para penjual dan pembeli potensial dari dua provinsi. Dengan



adanya misi dagang, diharapkan hubungan antar pelaku usaha lintas provinsi semakin erat dan pertumbuhan ekonomi semakin naik. Pada tahun 2023 target misi dagang sebanyak 1 pelaku usaha yang akan difasilitasi dalam misi dagang yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur. Sehingga realisasi kinerja pada Triwulan I masih 0.

XIII. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator Kinerja : Persentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang

Target Kinerja Tahun 2023 : 84%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 22,79%

Salah satu pendukung meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan adalah program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan indikator kegiatannya adalah prosentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang. Dimana persentase ini didapatkan dari jumlah Wajib Tera Ulang yang telah melaksanakan Tera / tera ulang dibagi dengan potensi Wajib Tera Ulang Kabupaten Lumajang sebanyak 84%, sehingga realisasi kinerja Triwulan I sebesar 22,79% sedangkan capaian terhadap target 27,13%.

13.1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Kinerja : Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang

Target Kinerja Tahun 2023 : Rp. 150.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 31.451.900

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan indikator kegiatannya adalah Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang. Dimana realisasi kinerja pada Triwulan I Rp 31.451.900,00.

13.1.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Indikator Kinerja : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang

Target Kinerja Tahun 2023 : 12.000 unit



Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 3.319 unit

Salah satu pendukung tercapainya pertumbuhan pasar tertib ukur adalah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan indikator jumlah UTTP yang di tera, tera ulang. Dimana capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 yaitu 3.319 unit. Sedangkan prosentase capaian sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 27,66%.

13.1.2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Indikator Kinerja : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina

Target Kinerja Tahun 2023 : 900 orang

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 196 orang

Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal merupakan kegiatan pendukung dari program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dimana indikator kinerja yaitu pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina, dengan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 adalah 196 WTU dikarenakan Ruang lingkup pengawasan (pengawasan UTTP dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) termasuk BDKT produk2 UMKM) dengan kondisi geografis yang luas tidak sebanding dengan ketersediaan SDM Pengawasan sehingga hanya fokus pada pengawasan UTTP dan pengawasan kemasan LPG, rendahnya pemahaman masyarakat tentang Metrologi Legal, dan masih adanya pelaku usaha yang kurang kooperatif saat kegiatan pengawasan/penyuluhan.

XIV. Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja : Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : 4%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%

Program Penggunaan dan Promosi Produk Dalam Negeri mempunyai indikator prosentase pertumbuhan nilai perdagangan



daerah dengan target kinerja pertumbuhan sebesar 4% dari pertumbuhan nilai perdagangan daerah 2021. Capaian kinerja kegiatan ini pada Triwulan I adalah 0% dikarenakan pelaporan dilaksanakan pada Triwulan IV.

14.1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja : Nilai Perdagangan Daerah

Target Kinerja Tahun 2023 : Rp 7.571.200.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 31.807.614.445

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai indikator nilai perdagangan daerah sebesar Rp 7.571.200.000.000. Penguatan daya saing industri dan pengamanan pasar produk dalam negeri sangat diperlukan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri, baik melalui program-program promosi seperti sosialisasi produk dalam negeri maupun pameran-pameran, serta mengajak kepada semua pihak agar terus memberikan dukungan untuk meningkatkan daya saing melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dengan menjaga kualitas. Realisasi nilai perdagangan yang daerah pada Triwulan I sebesar Rp 31.807.614.445.

14.1.1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Target Kinerja Tahun 2023 : 100 UMKM

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 UMKM

Salah satu pendukung pertumbuhan nilai perdagangan daerah adalah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota, berupa event Pasar Ramadhan yang akan dilaksanakan pada pada Triwulan II . Sehingga capaian kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan I masih 0%.



XV. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator Kinerja : Nilai produksi industri

Target Kinerja Tahun 2023 : Rp 1.379.000.000.000

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : Rp 0

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator nilai produksi industri yaitu Rp 1.339.000.000.000. Realisasi kinerja Triwulan I sebesar 0. Sesuai Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional tentang Pasal 4 ayat 2, bahwa Perusahaan Industri menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun.

15.1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah industri dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi

Target Kinerja Tahun 2023 : 50 ikm

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 ikm

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mempunyai indikator kinerja jumlah industri dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi tetapi capaian Triwulan I masih 0% dikarenakan akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

15.1.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 dokumen

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mempunyai indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri sebanyak 1 dokumen tetapi pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. sehingga capaian Triwulan I masih 0 dokumen.



15.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 dokumen

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat terkait Pelatihan GMP untuk Peningkatan Kualitas bagi IHT, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk IK Batik, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk IK Olahan Susu, Pelatihan Linting Rokok bagi IHT, Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha, Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standarisasi Produk IK Mebel, Pendampingan CPOB bagi IK Olahan Susu, Perolehan Sertifikasi Merek, Perolehan Sertifikasi Uji Nutrisi, Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal, Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikat TKDN, Temu Mitra dengan Usaha Besar, Toko Modern dan Marketplace, Bantuan Kemasan Produk IKM dan Lainnya, Bantuan Mesin dan Peralatan IK Olahan Susu. Fasilitasi ini bertujuan untuk memacu daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar semakin kompetitif di pasar domestik maupun global. Sisi penting kemasan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai sarana promosi yang berdaya jual. Belum ada realisasi kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 sehingga capaian terhadap target tahun 2023 yaitu 0%.

XVI. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja : Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI

Target Kinerja Tahun 2023 : 90%



Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 %

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota merupakan kegiatan memfasilitasi produk IKM untuk untuk mengantongi izin usaha. Kepemilikan izin usaha akan memberikan banyak manfaat untuk IKM. Di antaranya, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, dan menjadi nilai plus dari pada bisnis IKM lain yang tidak memiliki IUMK. Manfaat lain terdapatnya IKM yang memiliki izin usaha adalah mendapatkan akses untuk keperluan modal, dapat memiliki akses bekerja sama dengan minimarket, memiliki kesempatan untuk menjadi IKM binaan oleh pemerintah karena sudah terdaftar secara legal. Realisasi kinerja pada Triwulan I sebesar 0% dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

16.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja : Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

Target Kinerja Tahun 2023 : 4 rekomendasi

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 rekomendasi

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Kegiatan ini mempunyai indikator kinerja jumlah rekomendasi perolehan IUI sebanyak 4 rekomendasi. Realisasi kinerja pada Triwulan I adalah 0 rekomendasi dikarenakan akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.

16.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha



Industri, Perizinan
Perluasan Usaha Industri,
Perizinan Kawasan Industri
dan Perizinan Perluasan
Kawasan Industri
Kewenangan Kabupaten/
Kota

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan mempunyai indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen, akan tetapi realisasi kinerja triwulan I masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

XVII. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator Kinerja : Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri

Target Kinerja Tahun 2023 : 66%

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0%

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional adalah salah satu pendukung pencapaian PDRB sektor industri dimana mempunyai indikator kinerja prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri yaitu 66%. Sistem Informasi Industri Nasional bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Realisasi Triwulan I 0% dikarenakan pelaporan dilaksanakan setiap semester sesuai dengan Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian



Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional Pasal 4 ayat 2, bahwa Perusahaan Industri menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun.

17.1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia

Target Kinerja Tahun 2023 : 1 dokumen

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 Dokumen

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota mempunyai indikator jumlah dokumen informasi industri yang tersedia sebanyak 1 dokumen. Realisasi kinerja triwulan I masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

17.1.1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Indikator Kinerja : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terkait SIINAS

Target Kinerja Tahun 2023 : 2 kali

Realisasi Kinerja Tw I 2023 : 0 kali

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota mempunyai indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Realisasi kinerja triwulan I masih 0 dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Untuk mengetahui penyerapan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Triwulan I Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada table 3.3 sebagai berikut :



Tabel 3.3 Penyerapan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Triwulan I Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	10.989.601.153	2.018.313.199 (18%)
2	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	12.259.059.980	156.238.585 (1%)
3	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	4.833.869.313	0 (0%)
4	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.292.250.000	621.569.000 (19%)
5	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	310.389.380	40.912.380 (13%)

Dari tabel diatas menunjukkan dengan alokasi total pagu Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Rp 31.685.169.826,- dengan serapan anggaran Triwulan I sebesar Rp 2.837.033.164 atau 9%.

Untuk Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat Tabel. 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Triwulan I (%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Tidak dapat diukur karena menunggu	18%	Tidak dapat diukur
2.	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	1%	karena menunggu release data BPS



3.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	0%
4.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	19%
5.	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	Tidak dapat diukur karena menunggu release data BPS	13%

Dari Tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa capaian tingkat efisiensi belum dapat diukur dikarenakan capaian kinerja belum dapat diukur.

Dari Penjabaran diatas dapat diketahui hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2023 berdasarkan target indikator kinerja program Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:
 1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi



5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
8. Program Pengembangan Ekspor
9. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
10. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
11. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Hasil evaluasi 14 program yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh :

1. Beberapa sub kegiatan / kegiatan pada program tersebut yang dijadwalkan pada triwulan berikutnya.
2. Penundaan pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian terhadap program-program yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan PMK no 206 tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Adanya pergeseran anggaran yang menyebabkan *reschedule* kegiatan.

Analisis Tantangan serta Solusi Permasalahan

Dalam pencapaian sasaran pembangunan tidak lepas dari berbagai tantangan khususnya pada bidang koperasi, bidang perdagangan dan metrologi legal, dan industri dan usaha mikro yaitu :

1. Kurangnya kepatuhan koperasi dalam pelaksanaan RAT;
2. Dampak inflasi yang disebabkan oleh kenaikan bahan bakar minyak dan sejumlah komoditi barang kebutuhan pokok;
3. Banyak produk UMKM yang belum memenuhi standart ekspor;
4. Pengurangan lokasi pelayanan menyebabkan menurunnya jumlah UTTP yang di daerah;
5. Kurangnya koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terkait pengendalian izin usaha serta sering berubahnya regulasi/peraturan terkait perizinan usaha.
6. Putusnya jembatan perak yang menjadi akses utama Lumajang-Malang berdampak pada pelayanan masyarakat di Kecamatan Pronojiwo salah satunya Pasar Pronojiwo menjadi kurang optimal.

Dari tantangan diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang mengambil langkah



- langkah kedepan untuk meminimalisir tantangan tersebut melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kapasitas SDM bagi pengurus, Pengawas dan anggota koperasi;
2. Pengendalian harga dengan pengendalian stok ketersediaan barang
3. Melakukan pendampingan / inkubasi usaha terhadap calon / pelaku usaha eksportir. Serta mengembangkan industri yang berbasis potensi daerah utamanya produk yang berorientasi pada ekspor. Kebijakan tersebut diarahkan pada pengembangan industri yang berbasis pada potensi daerah utamanya produk yang berorientasi ekspor, berdaya saing, dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.
4. Perencanaan penjadwalan lokasi tera,tera ulang
5. Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penyesuaian kebijakan
6. *Reschedule* pelayanan tera, tera ulang dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

b. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan . Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Bupati Lumajang. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, maka pada tahun anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang mendapatkan alokasi anggaran yaitu sebesar Rp 31.685.169.826,00 yang digunakan untuk melaksanakan 17 program meliputi 26 kegiatan 50 sub kegiatan.

Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan untuk mengelolanya secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI	23.248.661.133	2.174.551.784	9



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.627.951.153	1.995.229.199	21
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.167.000	0	0
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.567.000	0	0
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	0	0
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	0	0
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000	0	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.673.684.579	1.546.526.671	20
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.617.940.579	1.538.402.671	20
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.744.000	8.124.000	17
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7.000.000	-	0
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	0	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000	0	
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	0	
1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	0	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	0	
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	5.000.000	0	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.165.466	107.516.072	37
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.988.004	-	0
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.820.375	69.507.200	84
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.911.087	8.064.150	15



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN (%)
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	1.485.000	-	0
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.961.000	29.944.722	21
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.030.738	0	
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.030.738	0	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.381.117.200	302.236.406	22
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.125.200	85.607.366	23
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.003.992.000	216.629.040	22
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.786.170	38.950.050	15
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.486.250	23.887.050	13
1.8.2	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	50.300.000	5.082.000	10
1.8.3	Pemeliharaan Aset tak berwujud	5.000.000	-	0
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.999.920	9.981.000	48
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	3.000.000	0	
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	0	
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	0	
III	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	28.400.000	5.100.000	18
3.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	28.400.000	5.100.000	22



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN (%)
	Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
3.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23.400.000	5.100.000	0
3.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	-	18
IV	Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi	37.560.000	0	0
4.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.560.000	0	
4.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	0	
4.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.560.000	0	
V	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	311.360.000	17.984.000	6
5.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	311.360.000	17.984.000	6
5.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	311.360.000	17.984.000	6
VI	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	981.330.000	0	
6.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	981.330.000	0	
6.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	981.330.000	0	



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG USAHA MIKRO	12.368.300.000		
VII	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	12.096.650.000	30.600.000	0,3
7.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	12.096.650.000	30.600.000	0,3
7.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	197.400.000	30.600.000	16
7.1.2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	11.899.250.000	-	0
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	162.409.980	125.638.585	77
8.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	162.409.980	125.638.585	77
81.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	162.409.980	125.638.585	77
IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.602.639.380		
9.1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1.450.000	0	
9.1.1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahayadan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.450.000	0	
9.1.2	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1.450.000	0	
X	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.117.800.000	621.569.000	20



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN (%)
10.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.272.800.000	411.569.000	18
10.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	687.400.000	17.969.000	3
10.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.585.400.000	393.600.000	25
10.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	845.000.000	210.000.000	25
10.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	845.000.000	210.000.000	25
XI	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	39.800.000	750.000	2
11.1	Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/ Kota	9.800.000	750.000	8
11.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barangdalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5.000.000	750.000	15
11.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.800.000	-	0
11.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsididi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	
11.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000	0	
XII	Program Pengembangan Ekspor	173.000.000	0	
12.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	173.000.000	0	
12.1.1	Pameran Dagang Nasional	100.000.000	0	
12.1.2	Pameran Dagang Lokal	60.000.000	0	
12.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	13.000.000	0	
XIII	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	200.589.380	40.162.380	20



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN (%)
13.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	200.589.380	40.162.380	20
13.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	175.389.380	35.062.380	20
13.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	25.200.000	5.100.000	20
XIV	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	70.000.000	0	0
14.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	70.000.000	0	0
14.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	70.000.000	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.833.869.313	0	0
XV	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4.833.869.313	0	0
15.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.826.169.313	0	0
15.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0
15.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.726.169.313	0	0
XVI	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	2.000.000	0	0
16.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000	0	0
16.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000	0	0
XVII	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5.700.000	0	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN I	CAPAIAN (%)
17.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	5.700.000	0	0
17.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5.700.000	0	0
JUMLAH		31.685.169.826	2.837.033.164	9%



Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.12**Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2023 dengan Anggaran Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya PDRB sektor Koperasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	189.035.108.703	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	10.989.601.153	2.018.313.199	18	Belum dapat diukur
2	Meningkatnya PDRB sektor Usaha Mikro	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp10.489.913.260.792	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	12.259.059.980	156.238.585	1	Belum dapat diukur

3	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	4.934.785.719.830	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	4.833.869.313	0	0	Belum dapat diukur
4	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.454.887.194.442	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	3.292.250.000	621.569.000	19	Belum dapat diukur
5	Meningkatnya pendapatan perkapita	Nilai Pendapatan Perkapita	22.279.999	Belum dapat diukur menunggu release BPS	Belum dapat diukur	310.389.380	40.912.380	13	Belum dapat diukur

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Triwulan I 2023



Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel diatas ditetapkan untuk sasaran strategis kualitas Perdagangan masyarakat tingkat efisiensinya belum dapat diukur karena menunggu release data PDRB dari Badan Pusat Statistik. Adapun realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan I pada tahun 2023 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI	Nilai PDRB sektor Koperasi	189.035.108.703	Menunggu data BPS		23.248.661.133	2.174.551.784	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100 %	22	22%	9.627.951.153	1.995.229.199	21
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	25	25%	11.167.000	0	0
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1	50%	3.567.000	0	0
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0	0%	4.000.000	0	0
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2	40%	1.500.000	0	0
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	1	13%	2.100.000	0	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan	100 %	25	25%	7.673.684.579	1.546.526.671	20



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Perangkat Daerah						
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 orang / 12 bulan	78	89%	7.617.940.579	1.538.402.671	20
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	3	25%	48.744.000	8.124.000	17
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3	25%	7.000.000	-	0
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	14	14%	5.000.000	0	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	0	0%	2.500.000	0	
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1	25%	1.500.000	0	
1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan		0%	1.000.000	0	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100 %	25	25%	5.000.000	0	
1.4.1	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi daerah	2 dokumen	2	100%	5.000.000	0	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %	20	20%	287.165.466	107.516.072	37
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0	0%	7.988.004	-	0



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2	100%	82.820.375	69.507.200	84
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	0	0%	53.911.087	8.064.150	15
1.5.4	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	0	0%	1.485.000	-	0
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	17	19%	140.961.000	29.944.722	21
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	0	0%	9.030.738	0	
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 unit	0	0%	9.030.738	0	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	25	25%	1.381.117.200	302.236.406	22
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3	25%	377.125.200	85.607.366	23
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3	25%	1.003.992.000	216.629.040	22
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	27	27%	255.786.170	38.950.050	15
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	73 unit	16	22%	179.486.250	23.887.050	13
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	66 unit	40	61%	50.300.000	5.082.000	10



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		yang Dipelihara						
1.7.3	Pemeliharaan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	0	0%	5.000.000	-	0
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 unit	1	100%	20.999.920	9.981.000	48
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Nilai Omset Koperasi Simpan Pinjam	10.000.000.000 rupiah	106.220.907.960	11%	3.000.000	0	
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha simpan pinjam Koperasi	80 %	0	0%	3.000.000	0	
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 unit usaha	0	0%	3.000.000	0	
II	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	82 %	45,11	55%	28.400.000	5.100.000	18
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	40 koperasi	240	600%	28.400.000	5.100.000	22
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 koperasi	2	5%	23.400.000	5.100.000	0



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	40 unit usaha	238	595%	5.000.000	-	18
III	Program penilaian kesehatan ksp/usp Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat	82 %	0,8	1%	37.560.000	0	0
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat	100 koperasi	1	1%	37.560.000	0	
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100 unit usaha	2	2%	15.000.000	0	
3.1.2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	4 unit usaha	0	0%	22.560.000	0	
IV	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pendidikan Koperasi	86 %	21	24%	311.360.000	17.984.000	6
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	250 orang	60	24%	311.360.000	17.984.000	6
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 orang	60	24%	311.360.000	17.984.000	6
V	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	81 %	0,6	0,80%	981.330.000	0	
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses	250 orang	2	1%	981.330.000	0	



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi						
5.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	250 orang	2	1%	981.330.000	0	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN USAHA MIKRO	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	10.489.913.260.792 rupiah	Menunggu data BPS	0%	12.368.300.000		
VI	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	76 %	0	0%	12.096.650.000	30.600.000	0,3
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Usaha Mikro	220 usaha mikro	0	0%	12.096.650.000	30.600.000	0,3
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standardisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kabupaten	220 unit usaha	0	0%	197.400.000	30.600.000	16
6.1.1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	194 unit usaha	0	0%	11.899.250.000	-	0



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Pendampingan Terhadap Usaha							
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Perkembangan Usaha Mikro	74 %	0	0%	162.409.980	125.638.585	77	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi	220 usaha mikro	150	68%	162.409.980	125.638.585	77	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	220 unit usaha	150	68%	162.409.980	125.638.585	77	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.454.887.194.442	rupiah	Menuunggu data BPS	3.602.639.380			
		Nilai Pendapatan Perkapita	22.279.999	rupiah	Menuunggu data BPS		0		
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	90 %		0%	1.450.000	0		
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahayadan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang diawasi	3 unit	0	0%	1.450.000	0		
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan	0	0%	1.450.000	621.569.000	20	
VII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Nilai retribusi	8.000.000.0	rupiah	621.569.000	28%	3.117.800.000	621.569.000	20



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	DISTRIBUSI PERDAGANGAN	pelayanan pasar	00					
7.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	prosentase sarana yang dibangun/di rehab	16,67 %	0	0%	2.272.800.000	411.569.000	18
7.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	30 unit	29	97%	687.400.000	17.969.000	3
7.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30 unit	29	97%	1.585.400.000	393.600.000	25
7.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola pasar yang dibina	64 orang	64	100%	845.000.000	210.000.000	25
7.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	3	25%	845.000.000	210.000.000	25
VII I	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil	84 %	92	110%	39.800.000	750.000	2
8.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan	13 barang	13	100%	9.800.000	750.000	8
8.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	3	25%	5.000.000	750.000	15
8.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	2	50%	4.800.000	-	0



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		ota						
8.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	84 kios	0	0%	30.000.000	0	
8.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 laporan	0	0%	30.000.000	0	
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Ekspor • Nilai Perdagangan Antar Daerah 	* 1.000.000.000 0 * 4.161.600.000 0	* 210.387.629.455 * 4.636.552.419	* 21% *0,11%	173.000.000	0	
9.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	nilai omset promosi dagang	250.000.000	0	0%	173.000.000	0	
9.1.1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15 pelaku usaha	0	0%	100.000.000	0	
9.1.2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	15 pelaku usaha	0	0%	60.000.000	0	
9.1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 pelaku usaha	0	0%	13.000.000	0	
X	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang	84 %	22,79	27%	200.589.380	40.162.380	20
10.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan	Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang	150.000.000	31.451.900	21%	200.589.380	40.162.380	20



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
10.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	12.000 unit	3.319	28%	175.389.380	35.062.380	20
10.1.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	900 orang	196	22%	25.200.000	5.100.000	20
XI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah	4 %	0	0	70.000.000	0	0
11.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Perdagangan Daerah	7.571.200.000,00	31.807.614.445	0,4%	70.000.000	0	0
11.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMK	0	0%	70.000.000	0	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Nilai PDRB Sektor Industri	4.934.785.719,830	Menunggu data BPS		4.833.869.313	0	0
XII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nilai produksi industri	1.379.000.000,00	-	0%	4.833.869.313	0	0
12.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industry dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi	50 ikm	0	0%	4.826.169.313	0	0
12.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	0	0%	100.000.000	0	0
12.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	0	0%	4.726.169.313	0	0



No	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI	90 %	0	0%	2.000.000	0	0
13.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 rekomendasi	0	0%	2.000.000	0	0
13.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	0	0%	4	0	0
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri	66 %	0	0%	5.700.000	0	0
14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia	1 dokumen	0	0%	5.700.000	0	0
14.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terkait SIINAS	2 kali	0	0%	5.700.000	0	0
JUMLAH						33.635.022.304	706.899.367	2,10 %





BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan I Tahun 2023. Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023. Obyektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis/RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Triwulan I Tahun 2023, yaitu Nilai PDRB Sektor Koperasi, Nilai PDRB Sektor Usaha Mikro, Nilai PDRB Sektor Industri, Nilai PDRB Sektor Perdagangan, Nilai Pendapatan Perkapita belum dapat diukur dikarenakan data tersebut menunggu release dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang. Adapun pencapaian Kinerja dan anggaran per program / kegiatan kurang sesuai dengan *schedule* yang direncanakan dikarenakan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya dan pergeseran anggaran yang menyebabkan *reschedule* pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan masih perlu diambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja. Langkah tersebut antara lain dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan nilai perdagangan daerah, memfasilitasi pelaku IKM agar produk IKM mampu berdaya saing sehingga dapat meningkatkan PDRB sektor perindustrian, meningkatkan pertumbuhan jumlah UTP yang ditera dan tera ulang, merehabilitasi sarana, dan prasarana perdagangan.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan laporan kinerja ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan



dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.